BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

A. Zaman Penjajahan (Sebelum Tahun 1906)

Pada zaman penjajahan Belanda Indonesia disebut "Hindia Belanda", yang memegang kekuasaan di Hindia Belanda ialah seorang Gubernur Jenderal. Mr. Herman Willem Deandels adalah yang menjadi Gubernur Jenderal yang menjabat tahun 1808 dan tahun 1811. Gubernur inilah yang memerintahkan untuk membuat jalan raya sepanjang pulau Jawa dari anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini melintasi Wilayah Kabupaten Bandung dan Kotamadya Bandung. Pusat Pemerintah Kota Bandung pada waktu itu terletak di kota Krapyak (Citereup) yaitu kurang lebih 9 km sebelah Selatan dari pusat kota Bandung. Letak kota itu oleh Gubernur Jenderal Deandels dipandang dari segi komunikasi, stategi, keamanan dan pertahanan tidak memenuhi kepentingannya. Maka diperintahkan kepada Bupati Bandung, ketika itu Wiranatakusumah III untuk memindahkan Ibukota Kabupaten dari kota Krapyak ke sebelah utaranya pada poros jalan raya dekat dengan sungai Cikapundung.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Bandung dilaksanakan dibawah pimpinan Bupati Wiranatakusumah III tanggal 25 Mei 1810. Pertama-tama dibangun gedung menghadap ke Alun-alun yang selesai pada 18 Januari 1881. Secara resmi

dipindahkannya Ibukota Kabupaten Bandung pada 25 Mei 1881. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten ternyata makin lama makin ramai, sehingga tahun 1862 oleh pemerintah Kolonial Belanda dijadi

kan tempat kedudukan Residen Priangan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota Cianjur.

Pada waktu R.A. Martanegara diangkat menjadi Bupati (1893) kota Bndung mengalami perubahan yang penting. Rumah-rumah yang beratap alang-alang diganti dengan genting. Selain itu juga memperhatikan perekonomian rakyat. Kota Bandung semakin lama semakin maju dan ramai. Terutama setelah adanya penghubung kereta api. Dengan keputusan Gubernur Jenderal pada 29 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai daerah Otonom *"Gemeente"* yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1906. Saat itulah yang dijadikan Hari Jadi Kota Bandung.

B. Zaman Pemerintahan Belanda (1906-1942)

Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 21 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai *"Gemeemte".* Menurut pasal 7 SK tersebut *"Gemeente Bandung"* itu diadakan suatu Dewan Haminte *(Gemeenteraad)* yang terdiri dari 11 anggota, yaitu 8 orang Bangsa Eropa, 2 orang Bangsa Indonesia Asli dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Badan tersebut diketuai oleh kepala Pemerintahan setempat *(Hoofd van Plaatselijk Bestuur)* di Bandung, yang dalam jabatan it uterus berlaku dari tahun 1906 sampai 1 Juli 1917, pada waktu itu pertama kalinya disebut *"Burgemeester van Bandung"* (Walikota Bandung).

Adanya penyusunan kembali pemerintahan, maka dengan SK Gubernur Jenderal pada 27 Agustus 1926 No. 3x (Staadsblaad 1926 N0. 369) sebagai pelaksanaan dari *wet vande staads inriching van Ned Indie* dinyatakan berlaku untuk "Gemeente Bandung". Maka sejak 1 Oktober 1926 ketentuan dalam Stanadgemeentte Ordonantie berlaku untuk Gemeente Bandung. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dari Staadgemeente Ordinantie, alat kelengkapan atau lembaga pemerintahan *"Staadgemeente Bandung",* yaitu *Raad (Stadsgemeente), College van Burgemeente en Wethouders* dan *Burgemester.*

C. Zanan Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada waktu pendudukan Jepang yaitu pada 9 Maret 1942 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Standsgemeenterad dan College van Burgemeester en Wethouders tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pemerintah kota Bandung seluruhnya dijalankan oleh seorang Sityo (Walikota) yang diangkat oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Pemerintah umum berada dalam tangan Sityo dan dalam Kota, Bupati Bandung tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Wilayah kota dibagi dalam empat kewedanaan yang masing-masing dikepalai oleh Wedana. Keempat kewedanaan, yaitu Bandung utara, Bandung Timur, Bandung Selatan dan Bandung Barat. Kewedanaan itu selanjutnya dibagi dalam beberaapa Desa yang dikepalai oleh Kutyo yang semuanya berjumlah 18 orang. Lurah-lurah dan pegawai Desa dijadikan Pegawai Negeri.

D. Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI maka Pemerintahan Kota Bandung dipinpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh suatu Komite Nasional. Komite Nasional ditugaskan untuk mengurus keamanan dan menyusun usaha perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Keadaan itu terus berlangsung sampai bulan April 1946, pada waktu itu seluruh kota Bandung diduduki oleh Tentara Sekutu. Seama kota Bandung diduduki Tentara Sekutu dan selanjutnya sampai terbentuknya *"Voorloopige Federal Regering voor Indonesia"* dulu (*Stadsdsblaad,* 1948 No.62) alat-alat pemerintah *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente de jure* tidak pernah dihapuskan. Keadaan tidak berubah setelah terbentuknya pemerintah Pra Federal.

Dengan SK Residen Kepala Pemerintah Priangan di Bandung pada 28 Juni 1948 No. 146 berdasarkan Peraturan kekuasaan Militer yang ditetapkan oleh Recomba Jawa Barat pada 6 Januari 1946 No. Recwj. 17/jiz Jo. tertanggal 20 Pebruari 1948 No. Recwj.20/jiz mulai 1 Juli 1948 untuk daerah *Staadsgemeente* Bandung dibentuk badan yang diserahi tugas kewajiban *College van Burgemeester en Wethouders* menurut *Staadsgemeente Ordonantie.* Badan itu dinamakan *Tijdelijke College van degelijks Bestuur* terdiri dari 11 anggota, yaitu 5 orang Bangsa Indonesia, 2 orang Bangsa Tionghoa, seorang Bangsa Arab dan 3 orang Bangsa Belanda, kesemuanya diangkat dengan SK tersebut. Kepala ketuan Badan tersebut diserahi tugas kewajiban Walikota menurut *Staadsgemeente Ordonantie*.kewajiban dijalankan oleh Residen K.P.S. Priangan . Pada 1 Juli 1948 alat-alat Staadsgemeente

Bandug dibangun kembali, berlaku sampai 24 Pebruari 1949 pada waktu mana SK Residen K.P.S. Priangan tersebut di cabut kembali.

Berhubung dengan penggabungan wilayah Negara Pasundan ke Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Presiden RIS No. 113 tahun 1950, maka telah dikeluarkan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950 mengenai pembubaran semua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah yaitu Kabupaten dan Kota. Untuk menghindari kevakuman kekuasaan, maka dengan surat keputusan Gebernur Jawa Barat tertanggal 2 Juli 1950 No. 2/Uh/GD-8/50, ditetapkan bahwa :

- Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Haminte Kota dilakukan oleh Residen yang bersangkutan, untuk Haminte Bandung oleh Residen Priangan.
- Kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, untuk Haminte bandung oleh WaliKota Bandung.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 4 April 1950 dan dengan demikian berakhirlah hidupnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan badan Pengurus Harian tersebut. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Bandung, yang didasarkan kepada Peratiran Pemerintah RI No. 39 tahun 1950. Pemilihan tersebut dilakukan dibawah pimpinan panitia Penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang diketuai

oleh Walikota Sendiri. Pada tanggal 6 Nopember 1950 diangkat 5 orang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara bersama-sama dengan Walikota Kepala Daerah Kota Besar Bandung yang merupakan Dewan Pemerintahan Daerah sementara.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah di Indonesia, maka perundang-undang lainnya mengenai Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No 1957 bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam Daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, yaitu Daerah swantara I, Daerah swantara Tingkat II dan Daerah swanrata Tingkat III.

Menurut pasal 2 dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, bahwa wilayah Negara RI terbagi habis dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkat, yaitu Provinsi atau DT.I, Kabupaten atau DT.II dan Kecamatan atau DT.III.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah bahwa sebutan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikepalai oleh seorang Walikotamadya. Sedangkan menurut pasal 13 ayat 2 UU No. 5 tahun 1974, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung Periode Tahun 1993 hingga sekarang (Kep.Mendagri No. 28 Th. 1992) adalah sebagai berikut :

a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
b. Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c. Sekretaris Kotamadya/Daerah.
d. Pembantu Walikotamadya.
e. BP 7.
f. Bappeda.
g. Itwilkodya.
h. Asisten Tata Praja.
i. Asisten Administrasi Pembangunan.
j. Asisten Administrasi.
k. Camat.
l. Kamtib.
m. Dinas Otonomi : (DPU, DTK, DPB, Dinas pertamanan, Dinas Kebakaran, Dipenda, Disperum, DKK, DKG, DKHP, DPTP, Diparda, Dinas Pemakaman, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Pasar).
n. Unit Peelaksana Daerah : (Bapedalda, BPP, R.M Babakan Siliwangi).
o. Perusahaan Daerah : (PDAM, PD Kebersihan, PD Bank Pasar).
p. Kantor (Catatan Sipil, Sospol, Bengdes)
q. Bagian.

r. Kecamatan.

s. Kelurahan.

4.1.1.3 Job Description

a. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

b. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kesehatan.

c. Dinas Tata Kota

Dinas tata kota yang sekarang berganti nama menjadi dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian urusan Pemerintah Daerah, di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

d. Badan Perencanaan Daerah

Badan perencanaan daerah mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya.

e. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup yang sekarang berubah nama menjadi kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Capil

Dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.

h. BPMPPKB

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

i. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM,

perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

j. Dinas Penanaman Modal

Dinas penanaman modal yang sekarang berganti nama menjadi kantor penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

k. Badan Kesatuan Bangsa

Badan kesatuan bangsa yang sekarang berganti nama menjadi kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

l. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

m. Kecamatan Cimahi Utara

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

n. Kecamatan Cimahi Selatan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

o. Kantor Kepegawaian Daerah

Kantor kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian daerah yang meliputi bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

4.1.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan, yaitu :
   - Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
   - Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
   - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang;
   - Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
   - Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
   - Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

b. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana

c. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi, yaitu :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
- penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan

- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
- Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

g. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal, yaitu :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung menurut Budi S. Purnomo.

(2009:34)

Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah ditambah dengan hasil retribusi daerah ditambah dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditambahkan dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung. Guna menjawab ketiga rumusan masalah penelitian, berikut ini akan diuraikan dan dianalisis data tahunan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal pada pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2001-2010.

Berikut gambaran untuk data tahun 2001-2010 yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

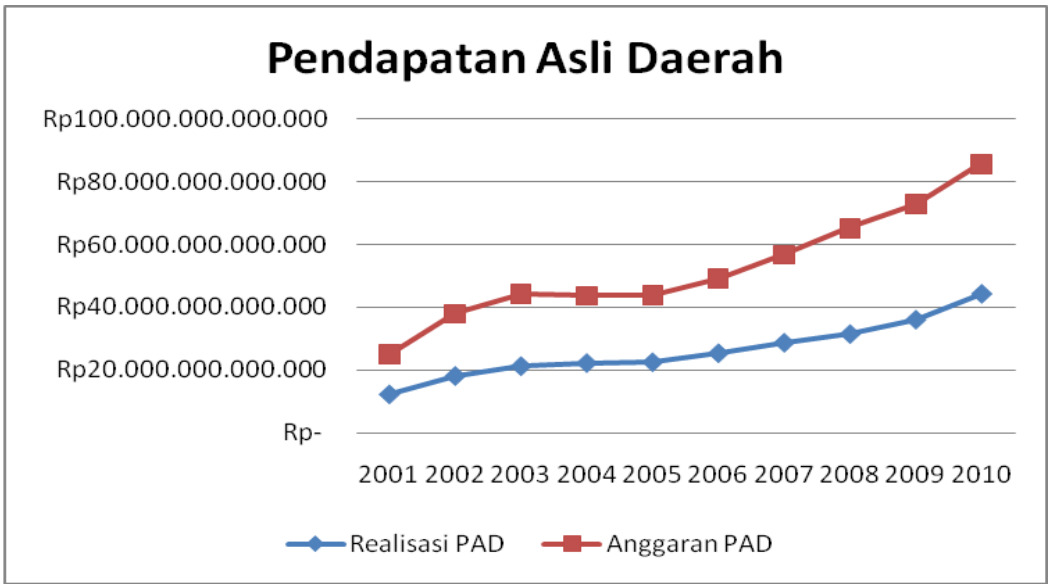
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun 2001-2010

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Pencapaian
2001	Rp 123,984,485,749.23	Rp 126,782,348,151.29	97.79%
2002	Rp 182,064,238,544.02	Rp 197,699,717,568.00	92.09%
2003	Rp 213,029,461,862.25	Rp 229,749,164,455.00	92.72%
2004	Rp 222,909,941,952.75	Rp 215,114,010,650.00	103.62%
2005	Rp 225,596,438,613.00	Rp 213,100,251,482.00	105.86%
2006	Rp 253,882,919,542.87	Rp 238,305,532,000.00	106.54%
2007	Rp 287,249,534,044.93	Rp 281,981,582,738.93	101.87%
2008	Rp 314,627,155,412.30	Rp 338,376,369,006.00	92.98%
2009	Rp 360,152,627,960.00	Rp 369,137,442,213.08	97.57%
2010	Rp 441,863,068,294.00	Rp 416,030,066,849.00	106.21%
Rata-Rata			**99.73%**

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung antara tahun 2001-2010 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 123,984,485,749.23, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 126,782,348,151,29 dan persentase pencapaian sebesar 97.79%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2001 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 182,064,238,544.02, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah

(PAD) sebesar Rp 197,699,717,568.00, dan persentase pencapaian sebesar 92.09% mengalami penurunan sebesar 5.7% dari tahun 2001 yaitu sebesar 97.79% hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2002 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

3. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 213,029,461,862.25, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 229,749,164,455.00, dan persentase pencapaian sebesar 92.72% mengalami kenaikan sebesar 0.69% dari tahun 2002 yaitu sebesar 92.09%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2003 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
4. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 222,909,941,952.75, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 215,114,010,650.00, dan persentase pencapaian sebesar

103.62% mengalami kenaikan sebesar 10.9% dari tahun 2003 yaitu sebesar 92.72%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2004 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

5. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 225,596,438,613.00, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 213,100,251,482.00, dan persentase pencapaian sebesar 105.86% mengalami kenaikan sebesar 2.24% dari tahun 2004 yaitu sebesar 103.62%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2005 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
6. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 253,882,919,542.87, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 238,305,532,000.00, dan persentase pencapaian sebesar 106.57% mengalami kenaikan sebesar 0.71% dari tahun 2005 yaitu sebesar 105.86%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2006 efektif

karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

7. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 287,249,534,044.93, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 281,981,582,738.93, dan persentase pencapaian sebesar 101,87% mengalami penurunan sebesar 4.7% dari tahun 2006 yaitu sebesar 106.57%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2007 meskipun mengalami penururan akan tetapi masih efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
8. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 314,627,155,412.30, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 338,376,369,006.00, dan persentase pencapaian sebesar 92.98% mengalami penurunan sebesar 8.89% dari tahun 2007 yaitu sebesar 101.87%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2008 tidak efektif karena kurang

dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

9. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 sebesar Rp 360,152,627,960.00, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 369,137,442,213.08, dan persentase pencapaian sebesar 97.57% mengalami kenaikan sebesar 4.59% dari tahun 2008 yaitu sebesar 92.98%. Dengan demikian meskipun mengalami kenaikan akan tetapi pendapatan asli daerah pada tahun 2009 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
10. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2010 sebesar Rp 441,863,068,294.00, sedangkan anggaran Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 416,030,066,849.00, dan persentase pencapaian sebesar 106.21% mengalami kenaikan dari tahun 2009 yaitu sebesar 97.57%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2004 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi

yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

4.2.1.2 Analisis Dana Alokasi Umum Kota Bandung

Dana Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya Dana Alokasi Umum menurut Budi S. Purnomo adalah berikut :

"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat".

(2009:37)

Dana alokasi umum diperoleh dari pemerintah pusat, yaitu besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah. Data dana alokasi umum diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya dana alokasi umum yang diukur dengan rasio yaitu

besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat selama tahun 2001 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

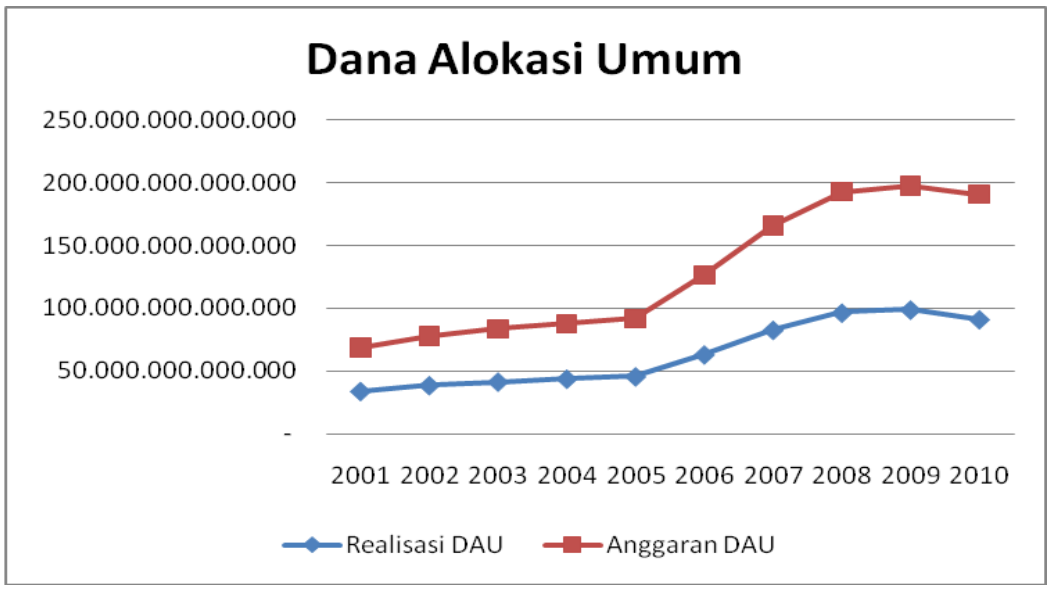
Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2010

Tahun	Realisasi DAU	Anggaran DAU	Pencapaian
2001	Rp 341,618,150,032.00	Rp 341,620,000,000.00	99.99%.
2002	Rp 388,260,000,000.00	Rp 388,260,000,000.00	100.00%
2003	Rp 416,680,000,000.00	Rp 416,680,000,000.00	100.00%
2004	Rp 439,689,469,000.00	Rp 434,500,000,000.00	101.19%
2005	Rp 458,072,000,000.00	Rp 458,070,000,000.00	100.00%
2006	Rp 632,379,000,000.00	Rp 632,379,000,000.00	100.00%
2007	Rp 828,294,700,000.00	Rp 827,608,000,000.00	100.08%
2008	Rp 965,518,566,800.00	Rp 965,516,430,000.00	100.00%
2009	Rp 989,233,620,000.00	Rp 989,245,660,000.00	100.00%
2010	Rp 912,571,834,000.00	Rp 997,018,087,600.00	91.53%
Rata-Rata			**99.28%**

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Untuk mengetahui gambaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung antara tahun 2001-2010 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.2 Grafik Dana Alokasi Umum

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 341.618.150.032.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 341.620.000.000,00 dengan persentase pencapaian sebesar 99.99%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2001 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

2. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 388.260.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 338.260.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalani kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2001 sebesar 99.99%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2002 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
3. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 416.680.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 416.680.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2002. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2003 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
4. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 439.689.469.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar

Rp 434.500.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 101.19% mengalami kenaikan sebesar 1.19% dari tahun 2003 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2004 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

5. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 458.072.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 458.070.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 1.19% dari tahun 2004 sebesar 101.19%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2005 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
6. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 632.379.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 632.379.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2005. Dengan demikian

pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2006 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

7. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 828.294.700.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 827.608.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100.08% mengalami kenaikan sebesar 0.08% dari tahun 2006 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2007 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
8. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 965.518.566.800.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 965.516.430.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 0.08% dari tahun 2007 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2008 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

9. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 sebesar Rp 989.233.620.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 989.245.660.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2009. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2009 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
10. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2010 sebesar Rp 912,571,834,000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 997,018,087,600.00, dengan persentase pencapaian sebesar 91.53% Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2010 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu

program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

4.2.1.3 Analisis Belanja Modal Kota Bandung

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal menurut Halim & Abdullah adalah :

"Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebuh dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya"

(2007:101)

Untuk data tahun 2001-2010 yang diteliti diperoleh Belanja Modal seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2010

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal	Pencapaian
2001	Rp 562,268,168,632.57	Rp 571,650,654,699.57	98.36%
2002	Rp 646,590,348,280.00	Rp 655,847,528,819.14	98.59%
2003	Rp 945,824,122,537.58	Rp 1,010,900,333,988.41	93.56%
2004	Rp 975,023,708,152.70	Rp 1,046,425,772,243.00	93.18%
2005	Rp 1,096,592,281,568.00	Rp 1,157,011,927,060.00	94.78%
2006	Rp 1,266,047,202,038.00	Rp 1,375,191,194,000.00	92.06%
2007	Rp 1,552,886,614,168.00	Rp 1,786,806,337,918.53	86.91%
2008	Rp 2,058,920,582,037.55	Rp 2,260,409,191,308.53	91.09%
2009	Rp 2,240,739,995,151.00	Rp 2,498,896,793,515.08	89.67%
2010	Rp 2,522,680,816,553.00	Rp 2,855,133,555,022.31	88.36%
Rata-Rata			**92.65%**

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Perkembanagn Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun 2001-2010 dapat digambarkan pada grafik berikut



Gambar 4.3

Grafik Belanja Modal

1. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 562,268,168,632.57 Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 571,650,654,699.57 dengan persentase sebesar 98.36%. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2001 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

2. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 646,590,348,280.00 Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 655,847,528,819.14, dengan persentase sebesar 98.59% mengalami kenaikan sebesar 0.23% dari tahun 2001 sebesar 98.36%. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2002 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
3. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 945,824,122,537.58, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 1,010,900,333,988.41, dengan persentase sebesar 93.56% mengalami penurunan sebesar 5.03% dari tahun 2002 sebesar 98.59%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2003 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

4. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 975,023,708,152.70, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 1,046,425,772,243.00, dengan persentase sebesar 93.18% mengalami penurunan sebesar 0.38% dari tahun 2003 sebesar 93.56%, yang diakibatkan oleh menurunnya belanja langsung. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2004 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
5. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 1,096,592,281,568.00, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 1,157,011,927,060.00, dengan persentase sebesar 94.78% mengalami kenaikan sebesar 1.6% dari tahun 2004 sebesar 93.18%. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2005 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

6. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 1,266,047,202,038.00, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 1,375,191,194,000.00, dengan persentase sebesar 92.06% mengalami penurunan sebesar 2.72% dari tahun 2005 sebesar 94.78%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2006 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
7. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 1,552,886,614,168.00, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 1,786,806,337,918.53, dengan persentase sebesar 86.91% mengalami penurunan sebesar 5.15% dari tahun 2006 sebesar 92.06%, hal ini terjadi karena kurang stabilnya perekonomian di Indonesia yang disebabkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di AS. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2007 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat

perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

8. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 2,058,920,582,037.55, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 2,260,409,191,308.53, dengan persentase sebesar 91.09% mengalami kenaikan sebesar 4.18% dari tahun 2007 sebesar 86.91%. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2008 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
9. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 sebesar Rp 2,240,739,995,151.00, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 2,498,896,793,515.08, dengan persentase sebesar 89.67% mengalami penurunan sebesar 1.42% dari tahun 2008 sebesar 91.09%, hal ini di sebabkan oleh belum stabilnya perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di AS. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2009 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat

perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

10. Belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2010 sebesar Rp 2,522,680,816,553.00, Sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 2,855,133,555,022.31, dengan persentase sebesar 88.36% mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 89.67%, hal ini di sebabkan oleh belum stabilnya perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di AS. Dengan demikian belanja modal pada tahun 2009 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

4.2.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kota Bandung

1. Analisis Statistik

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan. Pengujian

akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, analisis regresi linier berganda, pengujian uji asumsi klasik, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel X_1 dan dana alokasi umum sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu belanja modal.

Pada bagian ini akan disajikan hasil estimasi regresi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung menggunakan regressi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data tahunan selama 10 tahun pengamatan. Bentuk model persamaan regressi yang akan diuji diformulasikan sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y = Belanja modal

X_1 = Pendapatan asli daerah

X_2 = Dana alokasi umum

b_0 = konstanta

bi = koefisien regressi variabel Xi

ε = Pengaruh faktor lain

Model regressi tersebut digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada belanja modal yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum). Berdasarkan hasil pengolahan data pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung di peroleh hasil regressi sebagai berikut.

Tabel 4.4

Hasil Estimasi Model Regressi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-482771175785	1E+011		-4.823	.002
	PAD	4.516	.786	.609	5.745	.001
	DAU	1.073	.277	.411	3.873	.006

a. Dependent Variable: Belanja

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.4 maka dapat dibentuk model prediksi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal sebagai berikut.

$$\mathbf{Y = -482771175785 + 4{,}516\ X_1 + 1{,}073\ X_2}$$

Berdasarkan persamaan prediksi tersebut, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien pendapatan asli daerah sebesar 4,516 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu juta rupiah diprediksi akan meningkatkan belanja modal sebesar 4,516 juta rupiah dengan asumsi dana alokasi umum tidak mengalami perubahan.
- Koefisien dana alokasi umum sebesar 1,073 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satu juta rupiah diprediksi akan menaikkan belanja modal sebesar 1,073 juta rupiah dengan asumsi pendapatan asli daerah tidak berubah.
- Nilai konstanta sebesar -482771175785 menunjukan nilai prediksi rata-rata belanja modal apabila pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sama dengan nol.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kesahihan atau keabsahan hasil estimasi model regressi. Beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas

tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (2 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters [a,b]	Mean	-.0001213
	Std. Deviation	87836235171
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.108
	Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z		.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai signifikansi (*asymp.sig*.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,875. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.211	4.745
	DAU	.211	4.745

a. Dependent Variable: Belanja

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada tabel 4.6 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman,* yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.7 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	-.164
		Sig. (2-tailed)	.651
		N	10
	DAU	Correlation Coefficient	-.103
		Sig. (2-tailed)	.777
		N	10

Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan absolut error (yaitu 0,651 dan 0,777) masih lebih besar dari 0,05.

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.8

Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

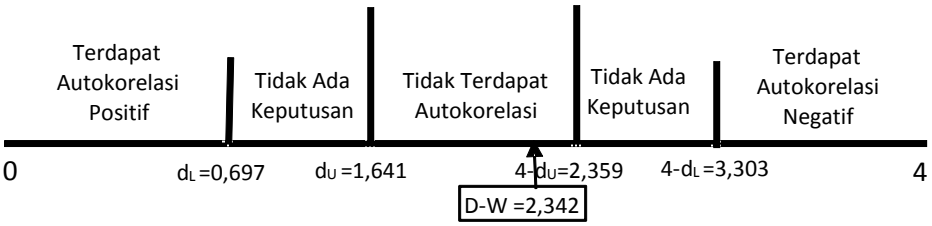
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992[a]	.983	.979	9.960E+010	2.342

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 2,342, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 10 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,697 dan batas atasnya (d_U) = 1,641. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (2,342) berada diantara d_U (1,641) dan 4-d_U (2,359), yaitu daerah tidak ada autokorelasi sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regressi.



Gambar 4.4

Daerah Kriteria Pengujian Autokorelasi

Karena keempat asumsi regressi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regressi sudah memenuhi syarat BLUE (*best linear unbias estimation*) sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

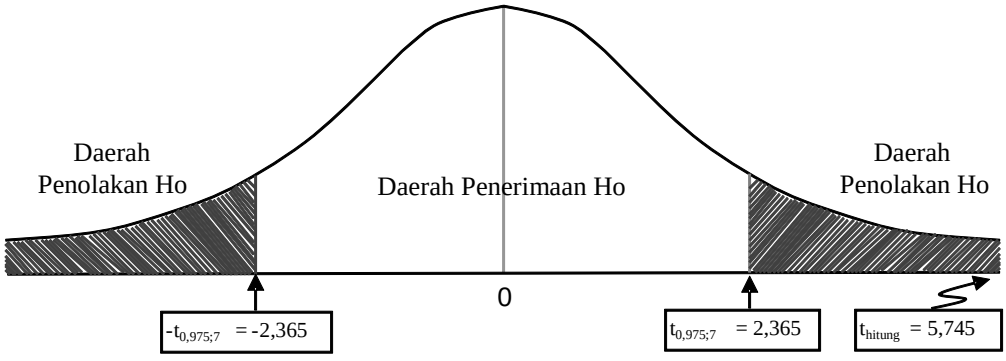
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$Ho_1.\beta_1 = 0$: Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

$Ha_1.\beta_1 \neq 0$: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah sebesar 5,745 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,365 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 7 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (5,745) lebih besar dari t_{tabel} (2,365) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_1 sehingga Ha_1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.5

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

(Pengaruh Pendapatan asli daerah)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja modal dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi parsial antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal ketika dana alokasi umum tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Koefisien Korelasi Parsial Pendapatan asli daerah Dengan Belanja modal

Correlations

Control Variables			Belanja	PAD
DAU	Belanja	Correlation	1.000	.908
		Significance (2-tailed)	.	.001
		df	0	7
	PAD	Correlation	.908	1.000
		Significance (2-tailed)	.001	.
		df	7	0

Koefisien korelasi parsial antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah sebesar 0,908 dengan arah positif. Artinya pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat

erat dengan belanja modal ketika dana alokasi umum tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa ketika pendapatan asli daerah meningkat, sementara dana alokasi umum tidak berubah maka belanja modal juga akan naik. Kemudian besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah $(0,908)^2 \times 100\% = 82,4\%$. Artinya pendapatan asli daerah memberikan pengaruh sebesar 82,4% terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Bandung.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja modal

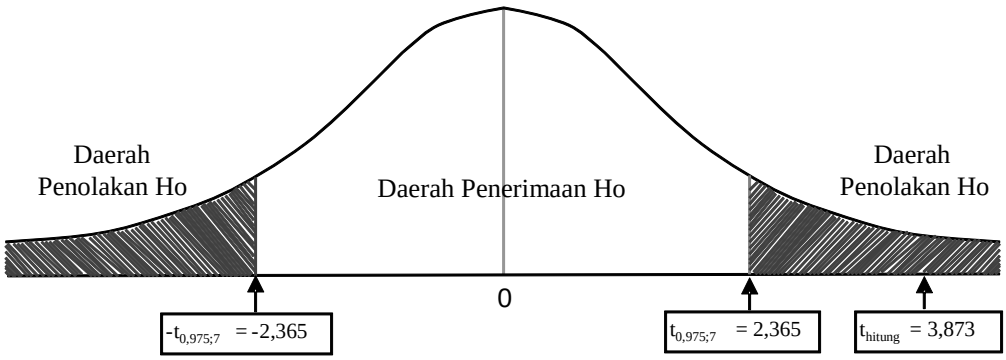
Diduga dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$Ho_2. \beta_2 = 0$: Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

$Ha_2. \beta_2 \neq 0$: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum sebesar 3,873 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar

2,365 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 7 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (3,873) lebih besar dari t_{tabel} (2,365) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_2 sehingga Ha_2 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.6

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

(Pengaruh Dana alokasi umum)

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal dihitung korelasi perasial. Koefisien korelasi antara dana alokasi

umum dengan belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Koefisien Korelasi Parsial Dana alokasi umum Dengan Belanja modal

Correlations

Control Variables			Belanja	DAU
PAD	Belanja	Correlation	1.000	.826
		Significance (2-tailed)	.	.006
		df	0	7
	DAU	Correlation	.826	1.000
		Significance (2-tailed)	.006	.
		df	7	0

Hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak berubah adalah sebesar 0,826 dengan arah positif. Artinya dana alokasi umum memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat erat dengan belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa ketika dana alokasi umum meningkat, sementara pendapatan asli daerah tidak berubah maka belanja modal akan meningkat. Kemudian besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak berubah adalah $(0,826)^2 \times 100\% = 68,2\%$. Artinya dana alokasi umum memberikan pengaruh sebesar 68,2% terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja modal dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel independen, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja modal dibanding dana alokasi umum.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja modal

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung, dilakukan pengujian secara bersama-sama dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_3 : Semua $\beta i = 0$ $i = 1,2$	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung
Ha_3 : Ada $\beta i \neq 0$ $i = 1,2$	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.11

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

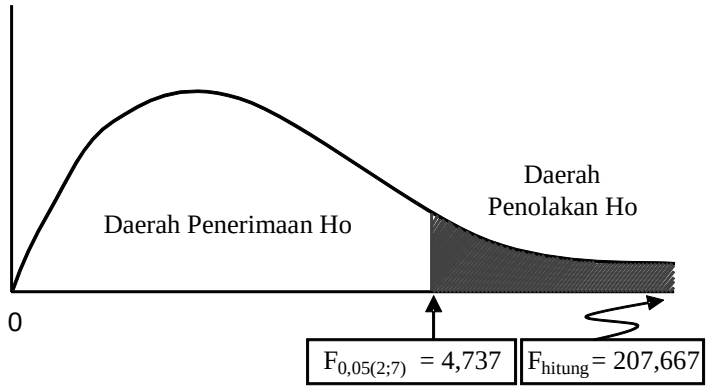
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.1E+024	2	2.060E+024	207.667	.000[a]
	Residual	6.9E+022	7	9.920E+021		
	Total	4.2E+024	9			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 207,667 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2;7) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,737. Karena F_{hitung} (207,667) lebih besar dari F_{tabel} (4,737) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho_3 sehingga Ha_3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.7

Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Pada grafik diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) secara bersama-sama dengan variabel belanja modal dihitung koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12

Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992[a]	.983	.979	9.960E+010	2.342

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Nilai R pada tabel 4.13 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) secara simultan dengan belanja modal. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki hubungan yang sangat kuat/sangat erat dengan belanja modal. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,992 berada diantara 0,80 hingga 1,00 yang termasuk dalam kriteria korelasi yang sangat kuat.

Selain korelasi berganda juga dihitung koefisien determinasi, yaitu suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,983 yaitu nilai R-Square pada tabel 4.13. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara

simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada belanja modal sebesar 98,3 persen. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 98,3% terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 1,7%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan transfer pemerintah provinsi.